

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Isbandi, A. S. (2012). *Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Kaho, J. R. (2007). *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Mardikanto, T. dan P. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, L. . (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Intan, F., & Mussadun. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Somarton. (2001). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Subono, N. I. (2019). *Perempuan dan Parrtisipasi Politik. Panduan Untuk Jurnalis*. Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Foundition.
- Sugiyah, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Politik*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutoro, E. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi dan Semangat UU Desa. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Tilaar, H. A. . (2009). *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia : Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tong, R. P. (2010). Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis. *Jalasutra*, 46672–46679.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zamhairi, M. (2008). *Prinsip-Prinsip Pembangunan Masyarakat : Transparansi, Partisipasi, Dan Keberlanjutan*. Bandung : Pustaka Masyarakat.

### 2. SKRIPSI

- Irmayanti. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Gampong Lhok Kuyun Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik : Universitas Malikussaleh.
- Muhammad, Reswandy. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kebun Durian Kecamatam Gunung Sahilan Kabupaten

- Kampar. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Siti, Sausan Maulida. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nurul Hidayah. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Mataram
- Adek Ayuni. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **3. JURNAL**

- Mustanir Ahmad, P. A. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. 5(2).
- Saptomo, D. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SEI GOLANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU Oleh. *Jom Fisip*, 4(1), 5–24. <https://media.neliti.com/media/publications/134467-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan.pdf>
- Kinanda, R., & Surya, R. Z. (2020). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ)*. 118–125.
- Andriani, T. (2018). Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan pasar Ciputat.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 45–49. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963>
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141–149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>

### **4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksana Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 5.

Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintah Gampong..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 8 ayat (2) e.